

Konflik antar Agama atau Politisasi Agama?

Margaretha Margawati
*(Jaringan Kerja Relawan
untuk Krisis Maluku)*

Pengantar

Saya baru kembali dari berlebaran di Batumerah, Ambon, pada tanggal 8 Januari, 2000 membawa sekotak kue bolu, oleh-oleh dari teman-teman relawan Muslim untuk rekan-rekan relawan Kristen di Mardika. Kue bolu masih berada di dalam kotaknya, ketika pembantu di biara yang menjadi posko relawan bertanya: "Ibu bawa apa?". Ketika saya mengatakan bahwa itu adalah kue oleh-oleh dari Batumerah, ia langsung menjerit ketakutan dan berlari menjauh.

Peristiwa di atas menggambarkan betapa hebat dampak dari kerusuhan yang berkepanjangan yang terjadi di Ambon, yang berawal pada hari Lebaran tahun sebelumnya. Masyarakat pada umumnya diliputi ketegangan dan ketakutan antara penduduk yang beragama Muslim dan yang Kristen. Dan memang, sejak kerusuhan tersebut, seluruh kota dan pulau Ambon tersegregasi ketat antara wilayah Muslim dengan Kristen. Mereka yang berbeda agama hampir tidak pernah berhubungan secara fisik, kecuali para relawan kemanusiaan, sedikit para pelaku bisnis, atau petugas pemerintahan. Itupun terbatas dilakukan di tempat-tempat netral yang sedikit saja jumlahnya.

Konflik di Ambon (Maluku) merupakan suatu contoh yang paling kuat mengesankan adanya konflik antar agama, utamanya Muslim dengan Kristen. Kesan ini bukan hanya bergaung di tingkat nasional, tetapi juga sampai ke

mancanegara. Karena itu menjadi salah satu alasan untuk penulisan makalah ini dan ditempatkan di bawah tema besar *Bhinneka Tunggal Ika: Masih mungkinkah?* Alasan lainnya adalah karena di beberapa daerah konflik yang bermuatan SARA, meskipun berlatar belakang yang berbeda-beda, seperti masalah tanah, ketidakadilan, dan sebagainya, banyak yang ujung-ujungnya melahirkan kesan bahwa konflik dan perpecahan tersebut adalah konflik antar agama. Dan khususnya di Ambon (Maluku), akhirnya masyarakat tersegregasi berdasarkan agamanya.. Selain itu, penulis, meskipun berada dalam jaringan kerja relawan yang terlibat dalam aksi kemanusiaan di berbagai wilayah konflik, menghususkan diri bekerja di Ambon dan Maluku Tengah. Maka pengetahuannya juga hanya sebatas pengalaman di wilayah tersebut.

Selama bekerja di wilayah tersebut, sejak awal 1999, memang pertanyaan utama adalah apakah konflik yang berdampak luas ini adalah konflik yang murni antar agama atau ada sebab lain? Mengapa orang-orang yang sebelum kerusuhan hidup bersama dalam kebhinekaan agama sekarang tiba-tiba menjadi terpisah dan saling memusuhi? Saling mencurigai? Sedemikian hebatkah pertentangan antar agama di sana sehingga aparat keamanan yang seharusnya netralpun menjadi terlibat? Mengapa kerusuhan menjadi sedemikian berkepanjangan? Adakah tanda-tanda dan peluang bahwa kebencian diakhiri? Untuk menjawabnya, pembahasan akan dipaparkan dalam dua bagian yaitu pertama, *Peta Konflik dan Dampaknya*, diikuti dengan bagian kedua: *Beberapa Analisa*. Paparan akan ditutup dengan *Kesimpulan dan Penutup*.

Peta konflik dan dampaknya

Secara garis besar, konflik di Ambon dapat dibagi dalam 4 babak yaitu:

Babak I: Januari-Maret 1999

Peristiwa sepele, dan dianggap biasa oleh masyarakat setempat, yaitu konflik antar preman Batumerah (Muslim) dan Mardika (Kristen) pada tgl. 19 Januari 1999, dalam sekejap menimbulkan pertikaian antar kelompok agama dan suku dan meledak menjadi kerusuhan besar di seantero kota Ambon, bahkan meluas ke seluruh pulau Ambon tanpa dapat dikendalikan.

Kerusuhan yang berlarut-larut di P. Ambon yang semula berpenduduk 312.000 jiwa ini memakan banyak korban jiwa. Membuat korban pengungsi sekitar 100.000 jiwa yang lari ke luar Ambon dan menyisakan 20.000 jiwa orang yang terpaksa tinggal di 34 lokasi pengungsian. Kota dan desa-desa di Ambon bertebaran dengan puing-puing bangunan rumah ibadat, rumah tinggal dan toko yang dibakar serta diratakan dengan tanah. Kota Ambon dan sebagian desa-desa sekitarnya tersegregasi ketat dan terbagi dalam 2 wilayah: Islam dan Kristen. Masyarakat dan wilayah Kristen disebut merah, dan yang Muslim disebut putih. Utamanya di kota

Ambon, masyarakat hidup dalam keadaan terpisah: pasar khusus merah, pasar khusus putih, pelabuhan speedboat merah dan putih, becak merah dan putih, angkot merah dan putih, bank merah dan putih, dan sebagainya.

Pemerintah daerah, aparat keamanan, pemuka-pemuka agama dan adat kemudian sibuk melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dengan berbagai gebrakan dan upacara "panas pela" dilakukan di sana-sini. Akhir Maret sampai pertengahan Juli 1999, Ambon relatif reda dari kerusuhan besar, meskipun masih terjadi insiden berdarah di sana-sini, dan juga di beberapa kota dan desa di pulau-pulau lain. Tetapi kerusuhan hebat berlangsung di Tual, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara pada akhir Maret, 2000.

Babak II: Juli-November 1999

Ambon tenang-tenang tegang sementara disugahi atraksi kampanye menjelang pemilu. Status wilayah keamanan ditingkatkan menjadi Kodam. Masyarakat tetap tersegregasi, meskipun di satu dua tempat agak cair. Kerusuhan di Tual reda dan konfliknya selesai. Usai Pemilu, ketegangan meningkat dan tiba-tiba pecah di daerah Poka dan meluas ke bagian lain di Ambon. Kerusuhan besar juga melanda wilayah Maluku Utara yang statusnya meningkat menjadi propinsi.

Segregasi semakin ketat, di Ambon hanya tersisa 1 desa (Wayame) yang masyarakatnya tetap berbaur. Sebutan merah diganti dengan Obet (Robert) dan bagi putih menjadi Acang (Hasan). Lokasi pengungsi di pulau Ambon menjadi 119 site untuk Muslim dan 123 site untuk Kristen. Masyarakat semakin mempersenjatai diri dengan berbagai bentuk senjata, mulai dari parang, rakitan hingga senjata organik. Milisia mulai tampak menonjol di dua pihak yang bertikai, dan teroganisir. Kelompok milisia anak-anak disebut pasukan Agas, yang remaja tergabung dalam pasukan Linggis, dan yang dewasa disebut Laskar Jihad dan Laskar Kristus. Yang menjadi kesibukan kaum pria pada umumnya hanyalah membuat senjata, dan terang-terangan meminta bantuan amunisi atau dana untuk membuat senjata. Amunisi memang diperjualbelikan secara terbuka.

Babak III: akhir Desember 1999- pertengahan Januari 2000

Memasuki bulan puasa, awal bulan Desember, konflik mereda, namun kesiapsiagaan dan ketegangan meningkat sangat tinggi. Situasi siaga sangat terasa di kedua belah pihak dan juga terjadi di P. Seram dan P. Buru. Tanda-tanda akan meledaknya kerusuhan menguat pada saat kunjungan Presiden dan Wakil Presiden pada akhir bulan Desember. Dan benar, kerusuhan meledak di Batumerah-Mardika, Ambon, pada tgl. 26 Desember, 2000, hampir serentak terjadi juga pada hari-hari berikutnya di Masohi, Seram dan Namlea serta sekitarnya di P. Buru. Wilayah-wilayah yang tersegregasi di Maluku Tengah dan Ambon semakin meluas. Selepas kunjungan Wapres berikutnya di bulan Januari 2000, terjadi lagi kerusuhan di Haruku dan Saparua.

Korban jiwa berjatuhan kembali, jumlah pengungsi meningkat tajam. Arus pengungsi masuk dari P. Buru ke Ambon. Sebagian ke Maluku Tenggara, dan dari P. Seram mulai memasuki Sorong, Papua. Sementara itu, arus pengungsi dari Maluku Utara (P. Bacan, P. Obi, dan Halmahera utara) juga mengalir ke Seram, Ambon, dan Maluku Tenggara. Ambon menjadi penuh sesak dengan pengungsi yang hampir-hampir tidak tertampung lagi.

Babak IV: April 2000 – sekarang

Sejak Februari- Maret 2000, sebenarnya situasi di Ambon sudah tenang. Aktivitas masyarakat mulai pulih meskipun terbatas di wilayah masing-masing. Jalan-jalan yang diblokir mulai dibuka dan dilewati oleh kedua belah pihak. Upaya rekonsiliasi dilakukan di beberapa tempat, di Jakarta (oleh team rekonsiliasi pusat), di Belanda atas inisiatif dan undangan pemerintah Belanda, di Bali oleh Pemerintah Inggris lewat Perwakilan PBB, di atas kapal-kapal TNI-AL dalam program Surya Bhaskara Jaya (SBJ).

Tetapi, gerakan Jihad yang berpusat di Yogya, Jakarta, Bogor, mulai meresahkan masyarakat Ambon. Pers setempat ramai memberitakan ancaman-ancaman Jihad, dan penolakan kedatangan Jihad muncul baik dari masyarakat Muslim apalagi Kristen.

Keresahan terbukti, sehari setelah kunjungan WaPres ke Ambon dalam rangka program SBJ, diawali peristiwa "makan Patita" antara kelompok milisia Batumerah (Muslim) dengan Kudamati (Kristen) yang disertai pawai becak, kerusuhan mulai merebak lagi. Kerusuhan juga menjadi berkepanjangan dengan cetusan berbagai insiden seperti insiden di Laha-Tawiri, dan sangat menghebat di bulan Juni-Juli dengan adanya ribuan pasukan Jihad di Ambon. Desa-desa Kristen seperti Ahuru, Poka, Rumah Tiga, Waai, dan kampung-kampung Kristen di Urimesing, Batumeja, Batugantung habis rata dengan tanah. Universitas Kristen, Universitas Negeri Pattimura, sejumlah bank swasta, gedung-gedung umum, rumahsakit swasta, bahkan asrama Brimob di Tantai ikut menjadi korban. Ambon saat ini benar-benar porakporanda, bantuan kemanusiaan sulit dilakukan dan di seluruh wilayah Maluku diberlakukan Darurat Sipil, setelah Pangdam Pattimura diganti.

Relawan dari Jaringan Kerja Relawan untuk Krisis Maluku yang saat ini berada di Ambon melaporkan bahwa situasi masyarakat memprihatinkan baik di wilayah Muslim maupun Kristen. Sekelompok orang di seputar Bandara menyerbu bantuan yang baru diturunkan dari Hercules, dan meskipun dapat diatasi, peristiwa tersebut menggambarkan bahwa masyarakat (Muslim) sangat sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Relawan Muslim juga sangat sulit berkomunikasi dengan yang Kristen karena takut terhadap tekanan dari Jihad. Sedangkan di wilayah Kristen, bantuan sulit untuk disalurkan karena faktor transportasi dan pemblokiran jalur masuk. Reaksi dari masyarakat Kristen terhadap bantuan memperlihatkan semacam apatisme.

Mereka mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah intervensi asing untuk pengamanan, bukan barang-barang bantuan.

Beberapa analisa

Apakah kerusuhan di Ambon merupakan konflik antar agama ?

Seperti pada kerusuhan-kerusuhan di wilayah lain di Indonesia, kerusuhan babak I di Ambon jelas memperlihatkan adanya rekayasa. Pola kerusuhan yang dipakai sama dengan pola yang diterapkan di tempat lain¹. Situasi kerentanan masyarakat lokal memang mudah untuk memicu sebuah kerusuhan. Kerentanan yang disebabkan oleh pola pemerintahan ORBA seperti yang dialami oleh masyarakat di wilayah lain seperti masalah tanah, KKN, kesenjangan sosial akibat ketidakadilan, perebutan posisi jabatan dan sebagainya sudah pasti dialami oleh masyarakat Ambon dan Maluku, maka tidak perlu dibahas lagi. Tetapi, secara khas, masyarakat Ambon dan Maluku memang mengalami semacam segregasi wilayah berdasarkan agama (Kristen dan Muslim) yang merupakan warisan sistem kolonialisme pemerintah Belanda. Konflik antar agama sering muncul secara sporadis, namun sejak kemerdekaan RI, tidak pernah meluas seperti sekarang. Masyarakat masih dapat mengandalkan budaya Pela Gandong untuk menyelesaikan konflik, yang meskipun pada jaman ORBA, budaya tersebut sedikit demi sedikit kehilangan kekuatannya, karena digantikan oleh kekuatan keamanan khas ORBA lewat ABRI-nya. Kerentanan khas dalam persaingan wilayah agama ini dijadikan peluang untuk meledakkan dan memelihara kerusuhan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ada banyak indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa berkembangnya konflik personal antar preman menjadi kerusuhan pada babak I, bukanlah tindakan spontan masyarakat Ambon, melainkan sengaja diciptakan. Pengkondisian kerusuhan sudah dimulai sejak satu dua bulan sebelumnya dengan berbagai cara : isu, selebaran gelap, telpon gelap, grafiti, dll. Hasutan- hasutan banyak yang memakai istilah yang tidak populer di masyarakat seperti misalnya: istilah Nasrani, padahal warga Ambon akrab dengan kata Serani, dan Muslim lebih akrab dengan Salami. Pada saat menjelang dan selama kerusuhan juga demikian: munculnya wajah-wajah tak dikenal pada menit-menit pertama kerusuhan meletus, ketika gerombolan masa mulai bergerak menjelang kerusuhan. Saat kerusuhan baru saja mulai, sudah muncul sekelompok orang di Batumerah dengan ikat kepala

putih dan di depan gereja Silo, orang sudah mengenakan ikat kepala merah. Ada orang-orang yang mengorganisir masa dengan peralatan HT dan mengendarai mobil bergerak mondar-mandir. Isu bahwa rumah-rumah ibadat sudah dibakar mendahului tindakan pembakaran itu sendiri, meskipun warga setempat tidak menghendakinya, namun sekelompok orang terus berteriak menghasut dan mengajak masa. Pada hari kedua muncul isu anti BBM (Bugis, Buton, Makasar), sebuah istilah yang baru dikenal sekitar 10 tahun terakhir², suatu ungkapan mengenai sentimen asal kedaerahan. Upaya-upaya tersebut berhasil memecah warga kota berdasarkan sentimen agama, dan juga diikuti dengan upaya menutup akses pihak-pihak di luar Ambon untuk mengkomunikasikan kejadian sebenarnya berupa ancaman terhadap wartawan lewat tilpon gelap.

Pihak mana yang merekayasa kerusuhan dan untuk kepentingan apa masih menjadi perdebatan banyak pihak. Ada yang mengatakan bahwa kerusuhan ini menjadi bagian dari strategi kelompok militer tertentu untuk mempengaruhi pemilu Juni 1999 dan membuat kondisi agar militer kembali berkuasa. Ada yang mengaitkan dengan keluarga Cendana. Tetapi yang jelas, kerentanan masyarakat setempat dalam konflik-konflik lokalnya tidak cukup kuat untuk menjadikan kerusuhan sebesar itu.

Mengapa kerusuhan menjadi berkepanjangan?

Kerusuhan berulang kembali pada babak II. Hal ini tidak terlepas dari kerentanan di dalam masyarakat Ambon sendiri akibat segregasi wilayah yang ketat, cara penanganan pengungsi yang justru memperpanjang konflik, ketidakprofesionalan pengusutan kerusuhan dan cara penanganan keamanan oleh militer, aktivitas-aktivitas rekonsiliasi yang elitis dan tidak membasis, dan anyak faktor lainnya.

Segregasi wilayah yang ketat membuat sebagian masyarakat Ambon, terutama yang Muslim di daerah Lei Hitu dan di kota mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan pelayanan lainnya. Misalnya, Pemblokiran jalan di sekitar Poka, menutup jalan darat ke Lei Hitu. Hal ini dibiarkan berlarut-larut dan memicu kemarahan masyarakat Hitu. Ditambah lagi, asal usul daerah Poka yang sebenarnya masuk ke petuanan Hitu justru diblokir. Di kota, masyarakat Muslim, berbaur dengan sekitar 10.000 pengungsi di wilayah yang sangat sempit. Ruang gerak terbatas. Akses ke pusat kota, di mana terdapat gedung-gedung pemerintahan, bank-bank, rumah sakit umum, sekolah-sekolah negeri dan Universitas negeri tertutup bagi mereka. Pelayanan kesehatan dan kesempatan bagi pendidikan anak-anak Muslim sangat minim. Sebaliknya di wilayah Kristen khususnya di kota, masyarakat juga mengalami kesulitan mendapatkan pasokan kebutuhan hidup, karena pelabuhan utama berada di wilayah Muslim. Transportasi dari satu tempat ke tempat lain menjadi sangat mahal karena tersekat-sekat. Bisnis keamanan dari aparat meningkat dan

¹ Pola kerusuhan di Tanah Ambon-Lease: Membaca Kejanggalan di Balik kerusuhan Berkepanjangan, Dokumentasi TRK-Ambon, 21 September, 1999.

² Pada waktu Kol. Dicky Wattimena menjabat walikota Ambon (1985-1991), dengan pendekatan khas militer ia menertibkan kawasan perdagangan yang didominasi pedagang Muslim dari Bugis, Buton, Makassar. Itu merupakan awal mula istilah BBM yang menjadi salah satu bibit dan basis konflik.

memberatkan masyarakat. Semua permasalahan ini tidak diperhatikan oleh aparat pemerintahan.

Cara penanganan pengungsi oleh Satkorlak yang membuat pengkotakkan masyarakat pengungsi berdasarkan agama memperparah situasi. Setiap bantuan dari luar yang disalurkan lewat Satkorlak dipusatkan ke 3 Posko utama: MUI, Maranatha/GPM, Crisis Center Keuskupan Amboina., baru disalurkan kepada masing-masing umatnya. Dengan demikian, lokasi-lokasi pengungsi yang semula masih menampung masyarakat campuran menjadi homogen. Homogenitas lokasi-lokasi pengungsi mempertajam kebencian dan permusuhan, bahkan menjadi pemusatan milisia.

Ketidakprofesionalan pengusutan terjadi sama seperti di wilayah lain di Indonesia. Tetapi, yang menjadi persoalan khas adalah ketidakseimbangan dan ketidaknetralan para pengacara, jaksa, hakim yang mayoritas Kristen.

Peningkatan keamanan daerah menjadi Kodam, penambahan pasukan TNI-AD, terbukti tidak mampu mengatasi kerusuhan. Aparat keamanan terlibat dalam setiap kerusuhan. Pembiaran masyarakat untuk memiliki senjata secara terang-terangan terjadi dan semakin meluas. Hal ini dapat dibicarakan secara khusus di tempat lain, karena sangat banyak fakta dan bukti yang dapat dikemukakan.

Upaya-upaya rekonsiliasi dilakukan secara tergesa-gesa, elitis dan tidak melibatkan masyarakat di tingkat basis, dan sangat memperlihatkan upacara-upacara seremonial belaka. Sebagai contoh, upaya rekonsiliasi di desa Laha, dilakukan di kompleks TNI-AU, masyarakat hanya menjadi penonton, dan pelaku utama adalah para pejabat serta yang terhibur justru para tentara yang mendominasi arena joget. Demikian juga acara rekonsiliasi yang condong kepada acara hiburan oleh aktris Maya Rumantir di lokasi pengungsi Secapa-Suli. Sedangkan upacara panas pela Desa Batumerah (Muslim) dan Passo (Kristen), sama sekali tidak memperhitungkan kenyataan bahwa masyarakat adat asli Batumerah hanya 20% saja, selebihnya pendatang dan pengungsi yang tentu saja merasa tidak memiliki ikatan Pela Gandong. Dan justru pelaku utama yang terlibat langsung dalam setiap kerusuhan, para preman, milisia, kapitan-kapitan dan panglima-panglima perangnya tidak disertakan. Selain itu, pernyataan bersama yang dilakukan oleh pemuka agama tidak melalui musyawarah bersama. Indikasinya, masyarakat mencemooh pernyataan bersama yang ditayangkan di media TV.

Meskipun faktor kerentanan semakin banyak dan kompleks, dan jika dianalisa, lebih banyak disebabkan oleh elite pemerintahan dan para pemuka agama serta tokoh masyarakat, namun para elite ini tidak pernah mengakui kesalahannya, mereka cenderung mempersalahkan dan masyarakat dan mengkambinghitamkan provokator yang tidak kunjung terungkap. Masyarakat kehilangan kepercayaan kepada para tokoh dan figur formal. Figur-figur informal muncul, tetapi yang berbasis kepada kemanusiaan universal kurang mendapat kesempatan, dan kalah oleh figur-figur informal yang langsung menjawab kebutuhan akan rasa

aman dari masing-masing pihak. Mereka adalah para panglima perang, kapitan-kapitan dan anak buahnya. Kelompok-kelompok ini yang belakangan mudah dijadikan alat untuk meledakkan kerusuhan babak kedua, dan ketiga oleh pihak yang berkepentingan.

Kesadaran masyarakat yang mulai muncul bahwa mereka diadu domba dengan mengoyakkan simbol Pela Gandong, merah dan putih, dihancurkan lagi dengan pengalihan simbol menjadi Acang dan Obet. Tataran emotif dipermainkan setiap kali kesadaran muncul. Kekuatan media masa dalam pemecahbelahan semakin dipakai, pers lokal mulai dipengaruhi sejalan dengan yang terjadi di media masa nasional. Contoh paling jelas adalah berita di Suara Maluku, yang beredar di wilayah Kristen dan berita di Ambon Ekspres di Muslim sangat berbeda untuk peristiwa yang sama. Pengkondisian untuk memberi kesan bahwa konflik di Ambon adalah konflik antar agama semacam ini jelas berasal dari luar Ambon.

Kepentingan sekelompok elite politik di pusat yang bermain dalam kerusuhan babak ketiga di Ambon sangat terbaca. 15 batalion pasukan keamanan, 16 buah panser yang dikerahkan menjelang dan sesudah kunjungan Gus Dur dan Megawati ke Ambon bulan Desember 1999, yang tidak mampu mencegah dan mengatasi kerusuhan babak III merupakan kegagalan yang tidak dapat ditutupi. Kelanggengan konflik yang dipelihara lewat berbagai cara, termasuk pasokan senjata dan amunisi, pelatih-pelatih pembuat senjata yang sangat ahli membutuhkan dana besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat Ambon sendiri. Masyarakat Ambon semakin rentan dan tidak berdaya untuk mengatasi kekuatan dari luar yang membuat mereka semakin hancur dan larut dalam keberberbedaan agama. Teror terhadap orang-orang yang mencoba menolak pengkotak-kotakan dan penghancuran ini dilakukan secara sistematis dan terus menerus.

Salah satu dari berbagai analisa yang dibuat oleh Team Relawan setempat bersama Kelompok Relawan dari Jakarta³ memunculkan indikasi keterlibatan kelompok TNI tertentu yang berkoalisi dengan kelompok elit politisi demi tujuan menjatuhkan kepemimpinan Gus Dur. Penciptaan kerusuhan babak III untuk menunjukkan salah satu ketidakberhasilan Gus Dur mengatasi konflik dalam kurun waktu 100 hari.

Dan kerusuhan babak IV, yang meskipun dibantah, melibatkan pasukan jihad yang didatangkan dari luar Maluku. Ambon saat ini hancur lebur meskipun sudah diberlakukan Darurat Sipil dan pasukan keamanan menjadi 22 batalion. Keterlibatan aparat keamanan dalam konflik mulai dibuka dan

³ PETA KONFLIK PASCA KERUSUHAN KETIGA, Dokumen TRK Ambon, Januari, 2000. Dokumen ini diolah oleh KONTRAS dan diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

⁴ SEJARAH GEREJA KATOLIK DI INDONESIA, Kursus Kader Katolik, Sekretariat Nasional K.M./C.C.C, Jakarta, 1971, hal 15-29.

diakui lewat pernyataan-pernyataan resmi dari TNI. Ketidakberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan mereka dan kebutuhan untuk campur tangan oleh pihak luar sangat dimanfaatkan. Masing-masing kelompok masyarakat yang dikotakan dalam agamanya mengulangi sejarah lama⁴, meminta bantuan pihak luar untuk membantu mereka menghancurkan yang lain. Padahal pada waktu itu pertentangan antara dua golongan yang berkedok agama sebenarnya merupakan perselisihan untuk merebut sumber-sumber kekayaan materiil yang dilakukan oleh para pedagang dari Gujarat, Portugis, dan VOC. Hasil dari politisasi agama adalah penguasaan VOC terhadap wilayah Maluku pada tahun 1605.

Sekarang, masyarakat Muslim di Ambon diperkuat oleh pasukan Jihad dari Jawa, dan yang Kristen mulai minta intervensi pasukan PBB. Berbagai isu berkembang sangat kuat bahkan juga di media masa harian setempat membahas secara terus menerus masalah intervensi asing ini. Di kamp-kamp pengungsi Kristen seakan ditumbuhkan harapan bahwa pasukan Australia akan datang membawa mereka ke luar dari Indonesia.

Kesimpulan dan Penutup

1. Uraian di atas setidaknya memberikan jawaban bahwa meskipun masalah perbedaan agama dan etnis cukup memberi peluang akan timbulnya konflik, namun kerentanan dari dalam masyarakat itu sendiri tidak mungkin sampai pada situasi yang menghancurkan diri sendiri tanpa mengalami tekanan yang cukup kuat dari luar.
2. Ada kesamaan pola kerusakan di Ambon dengan yang terjadi di wilayah-wilayah lain, dan simbol-simbol agama dipakai untuk membangkitkan sentimen agama dan etnis.
3. Setelah mengalami bencana kerusakan babak I, penanganan akibat dari bencana tidak dilakukan yang semestinya, penanganan darurat malah memunculkan kerentanan yang lebih parah, sehingga tahap pemulihan menjadi sulit. Hal ini menjadi peluang untuk memunculkan kerusakan-kerusakan berikutnya yang berkepanjangan.
4. Pertanyaan yang belum terjawab dari politisasi agama di Ambon di era reformasi sekarang ini adalah sejauh mana diberlakukannya darurat sipil dapat mengatasi kerusakan? Apakah ada upaya atau skenario tertentu untuk menciptakan konflik yang terus berlangsung ini ditujukan untuk memancing intervensi asing? Apakah ada tujuan di balik penyebaran isu akan adanya intervensi asing tersebut untuk melegitimasi suatu tindakan? Penghancuran struktur sosial masyarakat Ambon (Maluku) yang masih berlangsung memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak, pertama-tama untuk mengentikan pertikaian. Selanjutnya, masyarakat setempat harus dibantu untuk secara perlahan-lahan menata kembali kehidupannya, (istilah lokal yang dipakai untuk ini "baku bae"). Dari segi bantuan kemanusiaan

yang paling mendesak saat ini adalah segera melakukan intervensi dalam mengusahakan sarana transportasi untuk membuka ruang bagi perputaran ekonomi, dan dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika transportasi telah terbuka, meskipun masih ada segregasi, ruang untuk memberi berbagai bantuan lewat macam-macam program dapat dilakukan.

Lampiran :

PETA KONFLIK

BABAK I: 19 Jan-Mar'99

Pusat: Bt.merah-Mardika

Pemicu: Pertikaian preman

Dampak:

- Korban jiwa & luka
- Bangunan rusak (rumah, toko, rumah ibadat)
- 100.000 pengungsi ke luar Ambon
- 20.000 pengungsi di Ambon
- Segregasi: Merah & Putih
- Kerusakan meluas ke Tual

BABAK II: Juli-Nov'99

Pusat: Poka

Pemicu: Pemblokiran jalan

Dampak:

- Korban jiwa & luka
- Bangunan rusak (rumah, toko rumah ibadat)
- Harta benda dijarah
- 40.000 pengungsi
- Tersisa 1 desa campur
- Segregasi: Obet & Acang
- Kerusakan meluas ke Malut

PETA KONFLIK

BABAK III: Des'99-Jan'00

Pusat: Pohon Pule

Pemicu: Anak tertabrak

Dampak;

- Meluas ke Haruku, Seram, Buru
- 80.000 pengungsi di Ambon
- 20.000 pengungsi di Seram
- 10.000 pengungsi di Buru
- 2.000 pengungsi di Haruku
- Aliran pengungsi ke masing-masing wilayah memperluas segregasi seluruh Mal-Tengah

BABAK IV: April-sekarang

Pusat: Waihaong

Pemicu:

- konvoi becak
- penembakan warga di tawiri
- insiden di Paso
- kedatangan pasukan jihad

Dampak:

- Kehancuran yang semakin parah
- Darurat sipil
- Isu intervensi asing